



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**RABU, 30 MEI 2018**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS



**MATI PAJAK : Mobnas BD 1 Y yang dipegang Bupati Benteng merupakan salah satu mobnas yang diketahui telat pajak sudah 3 bulan.** FINTAH/RB

# Mobnas Bupati Menunggak Pajak

## Iswahyudi: Sistem Manual Sulitkan Kami

**BENTENG** - Mobil dinas (mobnas) yang berada di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Benteng informasinya banyak yang menunggak pajak. Bahkan termasuk dengan mobnas BD 1 Y yang biasa ditumpangi Bupati Benteng DR H Ferry Ramli diketahui juga sudah mati pajak 3 bulan.

Kabag Keuangan dan Aset Marhalim tak membantah hal itu. Dikatakannya, yang bertugas untuk meneliti dan mendata seluruh pajak kendaraan dinas ada di Bagian Umum Setdakab Benteng. Untuk pihaknya hanya bertugas memverifikasi dan mengeluarkan

keuangan yang dibutuhkan.

Mengenai pajak kendaraan, Marhalim mengaku hal tersebut bukanlah menjadi tugasnya. Sehingga dirinya tidak mengetahui pasti berapa jumlah kendaraan dinas di Setdakab yang telat membayar pajak, termasuk milik Bupati Benteng. "Tugas kami hanya memverifikasi dan mengeluarkan anggaran yang dibutuhkan setelah adanya usulan dari beberapa bagian termasuk bagian umum," terangnya.

Sementara itu, Kabag Umum Iswahyudi ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya memang kesulitan untuk mendata jumlah kendaraan dinas di Setdakab Benteng yang sudah menunggu pembayaran pajaknya. "Sistem manual menyulitkan kami menge-

tahui kendaraan dinas yang harus membayar pajak secepatnya," jelasnya.

Kalau ada sistem yang langsung terkoneksi dan tersambung langsung ke bagian umum, tentu hal tersebut akan lebih cepat diketahui. Termasuk untuk mobnas BD 1 Y, diakui Iswahyudi cukup sulit untuk mengetahui batas waktu pembayaran pajaknya. Karena, kendaraan tidak dipegang langsung olehnya, dan juga pada bagian plat kendaraan tidak tercantum juga bulan tanggal pajak harus dibayar.

"Kami akan perbaiki dan secepatnya untuk semua kendaraan dinas akan didata yang belum membayar pajak," demikian Iswahyudi. (vla)